



LAPORAN DELEGASI DPR RI THE 69TH SESSION OF THE COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN

9-14 Maret 2025, New York - Amerika Serikat





LAPORAN
DELEGASI BKSAP DPR RI KE
THE 69TH SESSION OF THE COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN
“PARLIAMENTS AND BEIJING +30: RESISTING THE BACKLASH AND
SHIFTING PARADIGMS TOWARDS GENDER EQUALITY”
9-14 Maret 2025, Markas Besar PBB, New York – Amerika Serikat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) berlangsung dari tanggal 10 hingga 21 Maret 2025, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Sesi ini menandai peringatan 30 tahun Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (BPFA), sebuah kerangka kerja penting untuk memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan secara global.

Pada CSW69, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri event parlemen yang dihelat IPU bekerja sama dengan UN Women dengan tema “Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality” pada tanggal 11 Maret 2025.

CSW69 menyediakan platform penting bagi negara anggota, entitas PBB, dan organisasi non-pemerintah untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi untuk memajukan kesetaraan gender. Sesi ini bertujuan untuk menginspirasi dan mendukung generasi pemimpin perempuan berikutnya dan menciptakan dunia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI ke Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/KU.05.01/ST/KSOI/1/2025

C. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi BKSAP DPR RI, yang menghadiri sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) 12 Maret 2025, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat terdiri dari:

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Irine Yusiana Roba	F. P-PDIP	Wakil Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2.	M. Husein Fadlulloh	F. Gerindra	Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi
3.	Diah Pikatan Orissa Putri	F. PDIP	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
4.	Rio Alexander Dondokambey	F. PDIP	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
5.	Adde Rossi Khoerunnisa	F. Golkar	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
6.	Saraswati Djojohadikusumo	F. Gerindra	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi

Selama mengikuti persidangan, Delegasi BKSAP didampingi oleh Pejabat dari Fungsi Maritim, Tata Kelola PBB, dan Isu Kemanusiaan PTRI New York, satu orang sekretaris dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, dan satu orang Tenaga Ahli BKSAP DPR RI.

D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan pengiriman delegasi BKSAP DPR RI ke Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69), adalah sebagai berikut:

1. Ikut berperan dalam memajukan BPFA di tingkat nasional dan internasional.
2. Ikut menunjukkan aspirasi dan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender di forum internasional. Lewat kehadiran ini, DPR RI menyampaikan pandangan dan rekomendasi terkait perlindungan serta pemberdayaan perempuan dalam konteks global.

3. Ikut mengadvokasi dan mendorong penyusunan kebijakan nasional yang sejalan dengan standar internasional terkait hak dan peran perempuan.
4. Partisipasi dalam Sesi ke-69 CSW memberikan kesempatan untuk bertukar gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik dengan delegasi dari berbagai negara terkait dengan strategi-strategi efektif dalam memajukan kesetaraan gender.
5. Penguatan diplomasi parlemen di mana DPR RI berperan sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan forum internasional untuk mendukung agenda Indonesia di bidang kesetaraan gender.

E. Misi Delegasi

Misi Delegasi DPR-RI dalam pertemuan Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) adalah:

1. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap Deklarasi Beijing dan Platform Aksi pada peringatan 30 tahunnya, dengan menitikberatkan pada langkah-langkah progresif seperti penegakan kebijakan yang responsif terhadap gender dalam pengambilan keputusan.
2. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap Deklarasi Beijing dan Platform Aksi pada peringatan 30 tahunnya, dengan menitikberatkan pada langkah-langkah progresif seperti penegakan kebijakan yang responsif terhadap gender dalam pengambilan keputusan.
3. Memperkuat peran diplomasi DPR RI dalam forum parlemen global.
4. Sebagai wujud peran aktif DPR RI terkait keanggotaannya di IPU dan PBB untuk membahas tema dan isu-isu yang menjadi agenda pembicaraan pertemuan khususnya.
5. Membangun kemitraan dan kerja sama di antara negara-negara anggota PBB dan IPU dalam kesetaraan gender.
6. Mengidentifikasi strategi dan prioritas global dan berkomitmen pada kebijakan dan rencana aksi untuk kesetaraan gender.
7. Fokus pada pencapaian kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

F. Persiapan Pengiriman Delegasi

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) ini. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri.

II. ISI LAPORAN

A. Agenda Sidang

PARLIAMENTS AND BEIJING +30: RESISTING THE BACKLASH AND SHIFTING PARADIGMS TOWARDS GENDER EQUALITY

11 March 2025, Trusteeship Council Room, UN Headquarters, New York

WAKTU	AGENDA
Selasa, 11 Maret 2025	
09:45–10:00	Arrival of delegates
10:00–10:15	Opening remarks <ul style="list-style-type: none">• IPU• UN-Women
10:15–12:00	Session 1: Women’s political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity <p>Participants will review the latest data and resources on women in politics. These include the IPU’s report <i>Women in Parliament 2024</i> and the IPU-UN Women 2025 Map Women in Politics. The session will provide space to take stock of the global state of women’s representation in political decision-making over the past 30 years, highlighting progress and persistent challenges, and identifying lessons learned. It will also provide an opportunity to take a look at the elections held in 2024 and their outcomes in terms of women’s political representation. The session will focus on the following questions:</p> <ul style="list-style-type: none">• What progress has been made in advancing women’s representation in parliament and political leadership globally over the past 30 years?• What are the main observations drawn from the 2024 election results regarding women’s participation in decision-making?• What are the barriers blocking greater progress and how can they be addressed?• What lessons can be drawn from countries that have demonstrated significant progress towards gender

	<p>parity in politics, and how can these successes inform global efforts?</p> <ul style="list-style-type: none"> • How can we inspire and support the next generation of women leaders to take on political roles? <p>Intervention:</p>
12:00–13:00	<p>Special segment: Panel discussion on shifting the paradigm towards parity</p> <p>Presentation of General Recommendation 40 of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) on the equal and inclusive representation of women in decision-making systems followed by a Q&A session with participants.</p>
13:00–15:00	Lunch break
15:00–17:00	<p>Session 2: Pushing back against the pushback</p> <p>This session will focus on setbacks and dangers of pushbacks that hinder progress on gender equality and women’s rights, and primarily on parliamentary action needed to address such challenges. The participants will identify pushbacks, their supporting forces and the damage they cause. They will also explore actionable solutions to reverse the backlash and sustain momentum towards gender equality, including through global partnerships, towards the implementation of the BPfA and SDG agendas. The session will focus on the following questions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In which areas are pushbacks most pervasive and what damage are they are creating? • What transformative actions can parliaments take to safeguard advancements in gender equality? • How can parliaments be gender-sensitive institutions able to push back against the pushback? • What partnerships are needed to address the rollback on women’s rights? <p>Intervention:</p>
17:00–17:30	Wrap up and concluding remarks

B. Jalannya Persidangan

1. Opening Ceremony

- a. Event parlemen yang dihelat IPU bekerja sama dengan UN Women dengan tema “Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality” dibuka tepat pukul 10 waktu New York, pada tanggal 11 Maret 2025.
- b. The Permanent Observer of the Inter-Parliamentary Union (IPU) to the United Nations Paddy Torsney membuka acara dan mempersilakan **Ms. Cynthia López Castro, Senator of Mexico and President of the IPU Bureau of Women Parliamentarians** memberikan sambutan.
- c. Dalam sambutannya, Cynthia menyoroti (1) pentingnya memastikan perempuan mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan politik dan sosial, serta mendemonstrasikan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk kemajuan masyarakat; (2) ia juga membicarakan perlunya menghapuskan hambatan struktural yang menghambat partisipasi perempuan, melalui perubahan mendasar dalam kebijakan publik untuk mengatasi diskriminasi dan bias gender. Selain itu, di akhir sambutannya, (3) ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas untuk menciptakan solusi kebijakan yang inovatif dan tepat guna dalam mendukung pemberdayaan perempuan.
- d. **Presiden IPU Tulia Ackson yang juga Ketua Parlemen Tanzania** menyampaikan sambutan. Beberapa poin penting sambutannya adalah (1) parlemen memiliki peranan penting dalam mempertahankan demokrasi dengan memastikan keterwakilan yang luas dan mendukung partisipasi aktif setiap warga negara; (2) ia mengajak parlemen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok hidup minoritas dalam proses pengambilan keputusan guna menciptakan kebijakan lebih inklusif; (3) ia juga menekankan perlunya kerja sama antar parlemennya di tingkat global untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- e. **Ms. Nyaradzayi Gumbonzvanda, Deputy Executive Director for Normative Support, UN System Coordination and Programme Results, UN Women** menyampaikan beberapa hal penting, di antaranya: (1) perempuan harus berperan secara strategis dalam pengambilan keputusan global untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. (2) ia juga menjelaskan tantangan nyata yang dihadapi perempuan—termasuk kekerasan dan diskriminasi—serta mengajak para pemimpin global untuk menerapkan kebijakan yang efektif dalam perlindungan hak-hak perempuan; dan (3) ia

menggarisbawahi bahwa akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan merupakan dasar pemberdayaan perempuan serta komponen penting bagi pembangunan berkelanjutan; (4) ia mengaitkan upaya pemberdayaan perempuan dengan terciptanya perdamaian dan stabilitas global, di mana peningkatan peran perempuan dinilai esensial untuk kemajuan sosial dan ekonomi.

- f. Jika dirangkum, ketiga pembicara di atas menggarisbawahi tekad untuk mendorong transformasi yang mendasar dalam tata kelola publik, dengan menempatkan prinsip kesetaraan gender, partisipasi aktif, dan kerja sama lintas negara sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

2. Sesi I Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity

Sesi pertama meninjau data dan sumber daya terbaru tentang perempuan dalam politik, termasuk laporan IPU "Women in Parliament 2024" dan peta "Women in Politics 2025" hasil kolaborasi IPU-UN Women. Sesi ini memberikan ruang untuk mengevaluasi kondisi global representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik selama 30 tahun terakhir, menyoroti kemajuan, tantangan yang masih ada, serta pelajaran yang dapat diambil. Peserta membahas hasil pemilu tahun 2024 dan dampaknya terhadap representasi politik perempuan, memberikan wawasan tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sesi ini menampilkan empat pembicara yakni **Ms. Cynthia Lopez Castro, Ms. Nafeesa Shah, Ms. Lashell Adderley, dan Ms. Kafilat Ogbara.** Berikut adalah poin-poin penting yang diangkat para pembicara:

a. Ms. Cynthia López Castro (Senator dan President of the IPU Bureau of Women Parliamentarians)

- Dalam paparannya, Cynthia menekankan pentingnya meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat kebijakan nasional maupun internasional, agar perspektif dan kebutuhan perempuan mendapatkan tempat yang setara.
- Cynthia juga mengusulkan agar reformasi kebijakan publik selalu mengintegrasikan pendekatan gender, sehingga setiap kebijakan mampu merespons tantangan kesetaraan dan keadilan sosial secara menyeluruh.
- Cynthia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung

pemberdayaan perempuan melalui reformasi dan inovasi kebijakan.

b. Ms. Nafeesa Shah (Chairperson of National Assembly of Pakistan dan Special Committee on Gender Mainstreaming)

- Nafeesa memulai dengan perlunya pendekatan interseksional dalam kebijakan. Ia menyoroti bahwa kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai dimensi identitas, seperti gender, ras, dan kelas, untuk mengatasi ketidaksetaraan yang terjadi secara bersamaan pada kelompok-kelompok rentan.
- Nafeesa menggarisbawahi perlunya perubahan mendasar dalam struktur dan sistem pemerintahan untuk menghilangkan hambatan yang mengunci potensi partisipasi penuh perempuan dan kelompok minoritas.
- Ia melanjutkan paparan mengenai pendidikan sebagai katalis perubahan dengan menekankan peran vital pendidikan dan peningkatan kesadaran sebagai alat untuk meruntuhkan stereotip gender serta membuka akses lebih luas bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

c. Ms. Lashell Adderley (President of the Senate the Bahamas)

- Lashell memulai paparan mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan sebagai kunci transformasi. Ia berangkat dari keyakinan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan tidak hanya memberikan representasi, tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan adil, mencerminkan pengalaman serta aspirasi seluruh masyarakat.
- Ia melanjutkan dengan membedah berbagai tantangan struktural dan kultural yang sering kali menghalangi perempuan untuk mencapai potensi kepemimpinan mereka, serta mengusulkan strategi konkret untuk mengurangi hambatan tersebut.
- Di akhir paparan, ia menekankan pentingnya membangun dan memperkuat jaringan serta aliansi antar perempuan di berbagai bidang, guna menciptakan dukungan kolektif yang dapat menghasilkan perubahan sistemik.

d. Ms. Kafilat Ogbara (Member of Parliament Nigeria)

- Sebagai pendahuluan, Kafilat mengemukakan bahwa perumusan kebijakan harus mencakup berbagai perspektif dan data yang mengindikasikan kebutuhan nyata perempuan dan kelompok rentan, sehingga hasilnya bisa lebih adil dan tepat sasaran.

- Ia menyoroti keharusan untuk mengadopsi metode inovatif, termasuk penggunaan data empiris, dalam merancang kebijakan agar solusi yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi saat ini.
- Ia mengajak terbentuknya kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik antar negara dan lembaga internasional sebagai upaya bersama dalam mentransformasikan lanskap pemberdayaan dan kesetaraan gender di tingkat global.
- Jika dirangkai, setiap pembicara menekankan pentingnya pendekatan inklusif, reformasi struktural, dan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi untuk mewujudkan kebijakan yang mampu merespons tuntutan zaman dan menjawab tantangan kesetaraan, khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan di berbagai lingkup kehidupan.

Sesi I dilanjutkan dengan penyampaian intervensi dari para peserta yang hadir. Berikut adalah catatan penting dari delegasi parlemen yang memberikan intervensi dalam Sesi I.

Delegasi Chile

- Delegasi Chile menyampaikan pentingnya negara mengidentifikasi dan menginisiasi program yang dibutuhkan anak dan perempuan untuk menjamin keterwakilan perempuan di politik.
- Parlemen dapat mewujudkan sistem legislasi preventif untuk mendukung kesetaraan gender.

Delegasi Meksiko

- Perlu mengubah peraturan pemilihan umum dengan menerapkan kuota gender 50% bagi perempuan
- Parlemen perlu menerapkan anggaran yang lebih besar bagi program kesetaraan gender di ruang publik.

Delegasi Turkiye

- Delegasi Turkiye menekankan pentingnya kebijakan dibuat inklusif bagi perempuan dan laki-laki sehingga tidak ada diskriminasi berbasis gender.
- Kesetaraan gender harus dibangun melalui peningkatan kesadaran di semua pemangku kepentingan.
- Parlemen perlu menghubungkan sumber daya yang ada sehingga dapat menginisiasi kebijakan kesetaraan gender.

Delegasi Perancis

- Delegasi Prancis menyebutkan pentingnya untuk menerapkan gender parity dalam proyek pembangunan nasional masing-masing negara. Tujuan dari gender paritas perlu ditetapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana semua orang dapat hidup dengan bebas dan penuh potensi, tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena jenis kelamin.
- Diplomasi parlemen perlu ditingkatkan menjadi solidaritas parlemen global dalam mengembangkan strategi feminis dalam meningkatkan proporsi perempuan di tingkat pengambilan kebijakan.

Delegasi Namibia

- Delegasi Namibia menyampaikan perlunya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik.
- Perlunya keterlibatan penuh anak muda dalam politik
- Negara perlu aksi afirmasi bagi perempuan di era digital.
- Pentingnya untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan

Delegasi Serbia

- Delegasi Serbia menyampaikan bahwa kesetaraan gender perlu dimasukkan secara tertulis dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan lainnya.
- Parlemen perlu memastikan bahwa peraturan yang dibuat menjamin inklusivitas politik.
- Parlemen perlu menampung solidaritas perempuan untuk terus menyuarakan perempuan di ruang publik.

Delegasi Parlemen Kongo

- Delegasi Kongo menyampaikan bahwa perempuan masih mengalami kekerasan di ruang privat dan ruang publik di negaranya.
- Negara perlu mendukung penuh otonomi perempuan di ruang publik
- Perempuan perlu berjejaring menjalin solidaritas dalam memperjuangkan nasib perempuan di ruang publik.

Delegasi Korea Selatan

- Delegasi Korea Selatan menyampaikan bahwa sistem sekarang dibuat dengan paradigma laki-laki. Oleh karena itu sistem harus diubah dengan memikirkan perspektif perempuan.
- Perlu solidaritas mendukung agenda perjuangan perempuan di ruang publik.



- BPFA dalam 30 tahun hanya menghasilkan kesuksesan implementasi di lapangan sebesar 20 hingga 27 persen.
- Parlemen harus di depan dalam memberikan kerangka hukum bagi perjuangan perempuan.

Delegasi Belgia

- Delegasi Belgia menyampaikan bahwa kuota gender yang diterapkan dalam kurun 1995-2025 berhasil meningkatkan 12 hingga 20 persen keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik.
- Dukungan dan bantuan harus ditargetkan pada perempuan dengan sangat fokus.
- Memanfaatkan media untuk memastikan pemilihan yang adil bagi perempuan.
- Perlu menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan dari kebencian dan pelecehan dalam bentuk apa pun.

Delegasi Parlemen Kanada

- Delegasi Kanada menyampaikan perlunya diversifikasi dalam mewujudkan gender parity
- Perlunya melibatkan lebih banyak perempuan dalam kepemimpinan politik.

Delegasi Parlemen UK

- UK telah mencapai 38 persen perempuan di parlemen
- Pentingnya menaikkan anggaran gender di ruang publik

Delegasi Parlemen Nigeria

- Seorang anggota parlemen Nigeria menyampaikan kisahnya ketika mengajukan petisi pelecehan seksual yang mengakibatkan dirinya ditangguhkan di parlemen selama enam bulan tanpa hak yang memadai seperti jaminan keamanan dan gaji
- Perempuan di Nigeria mengalami penindasan sistemik, kekerasan berbasis gender, dan korban politik.
- Perlu kerja sama global dalam melawan intimidasi politik terhadap perempuan

Delegasi Parlemen Maroko

- Perlu meningkatkan kualitas legislasi dalam melindungi hak-hak perempuan di ruang publik.
- Perlunya meningkatkan kesadaran publik tentang kesetaraan gender.

3. Sesi II Sesi II Pushing back against the pushback

Sesi II membahas tema Melawan Reaksi Balik. Sesi ini membahas hambatan dan bahaya dari reaksi balik yang menghambat kemajuan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dengan menekankan tindakan parlemen yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Peserta akan mengidentifikasi bentuk reaksi balik, kekuatan pendukungnya, serta kerusakan yang ditimbulkan terhadap upaya kesetaraan gender. Sesi ini juga mengeksplorasi solusi konkret untuk membalikkan reaksi balik dan mempertahankan momentum menuju kesetaraan gender, termasuk melalui kemitraan global untuk mendukung implementasi agenda BPfA dan SDGs.

Sesi II menyajikan paparan enam pembicara. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama yang disampaikan oleh para pembicara dalam sesi tersebut:

a. Ms. Julia Braunmiller (Senior Private Sector Development Specialist, Women, Business and the Law Project, World Bank)

- Julia berbicara mengenai perlunya reformasi kebijakan keluarga dengan menyoroti pentingnya merombak dan memodernisasi kebijakan keluarga agar mencerminkan berbagai bentuk keluarga dan pengaturan perawatan di era modern.
- Ia menjelaskan bahwa pekerjaan perawatan—baik yang dibayar maupun tidak dibayar—seringkali tidak dihargai, meskipun sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Ia mendorong agar peran perawatan diintegrasikan dengan perencanaan sosial dan ekonomi.
- Terakhir, ia menekankan perlunya kebijakan yang mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan sosial, sehingga setiap anggota keluarga mendapatkan perlindungan dan dukungan yang setara.

b. Ms. Antonia Kirkland (Global Lead, Legal Equality and Access to Justice, Equality Now)

- Antonia menegaskan bahwa kebijakan keluarga harus mempertimbangkan persimpangan ketidaksetaraan—seperti ras, kelas sosial, dan identitas gender—untuk menghindari solusi yang bersifat “satu ukuran untuk semua.”
- Ia mengajak pembuat kebijakan untuk mengatasi struktur masyarakat yang mendiskriminasi kelompok keluarga tertentu, melalui reformasi di bidang ketenagakerjaan, perumahan, dan kesehatan.

- Ia juga mengusulkan agar masyarakat secara aktif dilibatkan dalam perumusan kebijakan, sehingga reformasi lebih mencerminkan kebutuhan dan pengalaman nyata dari berbagai kelompok keluarga.
- c. **Mr. Seedy S.K. Njie (Deputy Speaker of the National Assembly Bahama)**
- Seedy berargumen untuk menempatkan kebijakan keluarga dalam kerangka hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap kebijakan tidak bersifat diskriminatif serta menjunjung tinggi martabat, kesetaraan, dan keadilan bagi semua jenis keluarga.
 - Ia menekankan pentingnya masukan lokal dan advokasi komunitas (*grassroots*) dalam merancang serta mengimplementasikan reformasi kebijakan keluarga.
 - Ia menyoroti disparitas dalam sistem dukungan sosial secara global, terutama di wilayah-wilayah di mana kebijakan tradisional kurang mampu melindungi populasi yang rentan.
- d. **Ms. Petra Bayr (Member of Parliament Austria)**
- Petra mencoba memulai paparan dengan implikasi ekonomi yang timbul sebagai akibat kebijakan yang diambil. Ia menggambarkan manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari investasi pada keluarga, seperti peningkatan partisipasi dalam angkatan kerja dan pengurangan ketergantungan pada layanan darurat.
 - Ia pun mengadvokasi pengembangan sistem perlindungan sosial yang kuat dan inklusif, tidak hanya untuk keluarga inti tetapi juga untuk jaringan kekerabatan yang lebih luas dan pengaturan keluarga non-tradisional.
 - Ia menunjukkan bahwa reformasi kebijakan keluarga sebaiknya menjadi bagian dari agenda reformasi sosial-ekonomi yang lebih luas, dan harus terhubung dengan sektor pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan.
- e. **Mr. Mohamed Farid (Senator Egypt)**
- Farid memulai paparan dengan mengaitkan kebijakan keluarga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan menunjukkan bahwa keluarga yang mendapat dukungan akan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan adil.
 - Ia pun mendesak agar pembuat kebijakan merancang undang-undang yang mengakui keberagaman bentuk keluarga dan adaptif terhadap perubahan dalam struktur pengasuhan dan pembentukan rumah tangga.

- Ia juga menyarankan agar ditetapkan metrik yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan keluarga dalam mempromosikan inklusi sosial serta mengurangi ketidaksetaraan.

f. **Mr. Gary Barker (President dan CEO Equimundo)**

- Gary mendorong perpindahan dari pendekatan tradisional menuju kebijakan yang inovatif dan visioner, lebih mencerminkan realitas kehidupan keluarga modern.
- ia mengimbau agar pemerintah dan lembaga menggunakan data dan riset yang komprehensif dalam merancang kebijakan keluarga, agar reformasi benar-benar merespons kebutuhan saat ini.
- Dalam kesimpulan ia menyerukan perlunya kemitraan dan kolaborasi multipihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta—untuk menciptakan kerangka kerja kebijakan keluarga yang berkelanjutan dan komprehensif.
- Secara umum, para pembicara menyampaikan visi yang menyeluruh dengan mengintegrasikan reformasi kebijakan keluarga, kesetaraan gender, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Visi ini bertujuan untuk mengakui dan mendukung keberagaman bentuk keluarga serta menghadapi tantangan ketidaksetaraan di berbagai lapisan masyarakat.

Sesi II dilanjutkan dengan penyampaian intervensi dari para peserta yang hadir. Berikut adalah catatan penting dari delegasi parlemen yang memberikan intervensi dalam Sesi II.

Delegasi Parlemen Mali

- Mali telah menerapkan kuota gender untuk memastikan keterwakilan perempuan di parlemen
- Perempuan di Mali dan negara Afrika lainnya membutuhkan dukungan akses perempuan ke pangan, kesehatan, dan pendidikan.
- Mali dan negara-negara Afrika lainnya berjuang untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan di ruang publik.
- Mali telah menerapkan mekanisme untuk terus mendorong perempuan aktif dan terlibat dalam politik.

Delegasi Yunani

- Kita harus memastikan situasi demokrasi di masing-masing negara untuk mengukur partisipasi perempuan dalam politik.



- Tidak akan ada partisipasi perempuan tanpa demokrasi yang baik. Kita mesti mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang demokrasi.
- Partisipasi perempuan akan meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan di suatu negara.
- Yunani komitmen dalam mendukung kesetaraan gender, namun yang lebih penting adalah merubah cara pikir tradisional politikus laki-laki untuk mengakomodasi kepentingan perempuan.

Delegasi Parlemen Lithuania

- Reaksi balik yang melawan perjuangan kesetaraan gender berawal dari kondisi demokrasi yang memburuk di seluruh dunia.
- Propaganda dari rezim yang berkuasa juga berdampak terhadap demokrasi seperti invasi Rusia atas Ukraina.
- Sabotase terhadap demokrasi memunculkan menurunnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik.
- Lithuania dapat meningkatkan peran perempuan dalam politik karena amendemen konstitusi yang memungkinkan perempuan menjadi presiden, PM, dan menteri pertahanan.

Delegasi Meksiko

- Kebijakan tentang kesetaraan gender mesti dilihat dari perspektif keluarga yang memungkinkan anak laki-laki dan perempuan mempunyai dasar yang sama dalam melihat kesetaraan gender.
- Meksiko mengalami tantangan dalam menerapkan anggaran yang memadai dalam kesetaraan gender.
- Investasi tentang anak akan menciptakan generasi yang memandang kesetaraan lebih baik di masa mendatang.

Delegasi Chile

- Chile menghadapi tantangan stereotipe gender di lapangan. Amendemen konstitusi dan implementasi regulasi yang pas memungkinkan kenaikan jumlah perempuan dan senat maupun di Camara de diputados sebesar 24 persen.
- Banyak dari gubernur yang terpilih adalah perempuan.

Delegasi Maroko

- Maroko telah mencapai perubahan signifikan penting dalam memajukan perempuan di bidang politik berkat jasa Raja Mohamed VI.

- Banyak UU maupun regulasi yang memungkinkan perempuan mengakses jalur politik untuk mencapai kesetaraan gender. Hal ini berlaku hingga tingkat pemerintahan kota.
- Maroko terus memerangi gender stereotipe dalam politik dengan mengutamakan nilai-nilai Maroko.

Delegasi Parlemen Korea Selatan

- Kesetaraan gender adalah HAM paling mendasar. Dalam kenyataan, implementasi di lapangan tidak selalu mulus.
- Perlu media sosial untuk memerangi misinformasi dan hoaks tentang peran perempuan dalam politik.
- Pemerintah Korea bersama Pemerintah Daerah serta komunitas bekerja sama erat untuk terus menggaungkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting perempuan di politik.
- Korea mempunyai dana alokasi khusus untuk pengarusutamaan gender di ruang publik. Perlu kerja sama global untuk mencapai target keterwakilan perempuan di politik dan melawan arus balik perlawanan terhadap ide kesetaraan gender.

Delegasi Parlemen Turkiye

- Peran parlemen Turkiye amat strategis dalam mendukung kebijakan negara yang inklusif dan berwawasan gender.
- Parlemen Turkiye selama 20 tahun telah berperan menerapkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta memerangi kekerasan berbasis gender.
- Parlemen Turkiye telah berperan penting ikut ambil bagian dalam menggugah kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender.
- Turkiye menerapkan dokumen strategi dan aksi nyata 2024-2028 agar perempuan mendapat hak-hak dasarnya.

Delegasi Parlemen Guatemala

- Di Guatemala, Wakil Presiden Perempuan, gender parity telah tercapai di kabinet pemerintahan dan pemerintah daerah. Namun demikian, perwakilan perempuan di parlemen kurang dari 20 persen.
- Machismo dan kolonialisme masih menjangkiti Guatemala sehingga pola pikir yang meminggirkan peran perempuan di ruang publik masih membekas di kalangan rakyat Guatemala.
- Penting untuk menerapkan CEDAW dalam kerangka hukum nasional.

Delegasi Parlemen Myanmar

- Kudeta militer di Myanmar pada 2021 berdampak pada pembungkaman kepemimpinan perempuan di Myanmar, termasuk menekan partisipasi perempuan di politik.
- Isu perempuan kini didominasi oleh masalah keselamatan perempuan Myanmar.
- Perlu kemitraan global serta kerja sama antar parlemen untuk mengatasi kesenjangan gender yang makin melebar di Myanmar.
- Mendesak UN Women, IPU, komunitas internasional untuk mendesak junta militer mengakhiri represi terhadap perempuan di politik.

Delegasi Parlemen Perancis

- Kita membutuhkan solidaritas global dalam memerangi stereotipe gender. Solidaritas global dapat kita bangun melalui diplomasi parlemen.
- Kita perlu membangun bersama ide diplomasi feminis dalam upaya memperjuangkan kebebasan perempuan dan memerangi ketidaksetaraan gender.
- Kita perlu memikirkan bagaimana menyelamatkan perempuan dalam wilayah konflik sebagaimana perempuan dalam domestik rumah tangga.

Delegasi Parlemen Botsawa

- Sejak 2024 Bostwana telah melakukan reformasi hukum dan kebijakan untuk memajukan hak-hak perempuan dan melindungi hak-hak perempuan terutama kesetaraan pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan, hak-hak reproduksi, kekerasan berbasis gender serta hak-hak ekonomi lainnya.

Delegasi Parlemen Ukraina

- Ketidaksetaraan gender membuat mundur kondisi demokrasi yang mengutamakan dan mengedepankan HAM.
- Tiga area kritis dalam kesetaraan gender: (1) politik representasi perempuan; (2) keadilan ekonomi; (3) kekerasan berbasis gender.
- Misinformasi dan media sosial mendiskreditkan perempuan, melemahnya dukungan bagi kewirausahaan perempuan, dan masalah keamanan menyebabkan perempuan menjadi golongan rentan.
- 26 persen perempuan duduk di Parlemen Ukraina, 50.000 perempuan menjadi tentara Ukraina, serta 5.000 perempuan Ukraina berada di arena terdepan perang.

- Beberapa hal perlu ditekankan: kesetaraan gender harus menjadi norma, perlu mentoring untuk mendukung perempuan, serta meminggirkan pola pikir seksisme dalam setiap pengambilan kebijakan.
- Parlemen tidak hanya membuat atau meloloskan UU namun membuka debat publik untuk mencapai partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pengambilan kebijakan.

Delegasi Parlemen Guinea

- Guinea memperluas kampanye publik untuk menyadarkan pentingnya kesetaraan gender di kalangan akar rumput.
- Laki-laki perlu bergabung dalam upaya memerangi ketidaksetaraan gender.
- Guinea sekarang memiliki kuota gender sebesar 31 persen di kursi parlemen. Guinea hanya memiliki kuota gender sebesar 18-20 persen pada periode sebelumnya.
- Perlu memperjuangkan gender parity sebesar 50-50%.

Delegasi Parlemen Uruguay

- Perlu terus menyuarkan hak-hak perempuan.
- Parity hanya representasi, yang diperlukan distribusi kekuasaan yang adil di semua level kepemimpinan.
- Perlu politik kepedulian untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di ruang publik khususnya politik.

Delegasi Parlemen Kanada

- Sejak 2018, Kanada serius memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan penduduk asli untuk mencapai hak-hak dasar.
- Perempuan penduduk asli Kanada telah lama tidak terjangkau dalam sistem kesehatan serta sistem pendidikan. Itulah yang membuat hambatan mereka sedikit terwakili dalam politik.

4. PARTISIPASI DELEGASI BKSAP DPR RI

Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan intervensi dalam dua sesi yang berbeda.

a. Sesi pertama Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity

Dalam sesi pertama, peserta meninjau data dan sumber daya terbaru tentang perempuan dalam politik, termasuk laporan IPU "Women in



Parliament 2024" dan peta "Women in Politics 2025" hasil kolaborasi IPU-UN Women. Sesi ini memberikan ruang untuk mengevaluasi kondisi global representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik selama 30 tahun terakhir, menyoroti kemajuan, tantangan yang masih ada, serta pelajaran yang dapat diambil. Peserta membahas hasil pemilu tahun 2024 dan dampaknya terhadap representasi politik perempuan, memberikan wawasan tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Pertanyaan Utama yang dibahas

- 1) Kemajuan apa yang telah dicapai dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen dan kepemimpinan politik secara global selama 30 tahun terakhir?
- 2) Apa pengamatan utama dari hasil pemilu 2024 terkait partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan?
- 3) Apa hambatan yang menghalangi kemajuan lebih besar, dan bagaimana cara mengatasinya?
- 4) Pelajaran apa yang dapat diambil dari negara-negara yang menunjukkan kemajuan signifikan menuju kesetaraan gender dalam politik, dan bagaimana keberhasilan ini dapat menginspirasi upaya global?
- 5) Bagaimana kita dapat menginspirasi dan mendukung generasi pemimpin perempuan berikutnya untuk mengambil peran politik?

Poin-poin ini mencerminkan fokus sesi dalam mengevaluasi kondisi politik perempuan secara global dan merancang strategi untuk mendukung kesetaraan gender di masa depan.

Dalam sesi pertama, delegasi BKSAP DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyampaikan intervensi. Berikut adalah poin penting yang disampaikan anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra:

- 1) Kesetaraan gender bukan hanya merupakan isu perempuan semata akan tetapi isu kemanusiaan. Kita membutuhkan laki-laki untuk juga menerapkan gender equality di semua bidang. Dirinya mengapresiasi kehadiran anggota parlemen laki-laki di forum ini untuk mendukung perjuangan kesetaraan gender.
- 2) Indonesia dengan bangga memperkenalkan anggota parlemen perempuan muda berusia 26 tahun dari PDIP yang hadir di tempat ini. Saraswati Djojohadikusumo juga bangga memperkenalkan anggota parlemen termuda dan juga perempuan dari Partai Gerindra.

- 3) Pemilu Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka tanpa spending cap dan menjadi mahal ongkos politiknya untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.
- 4) Mustahil pemenuhan keterwakilan perempuan di parlemen tanpa perubahan mendasar dalam tatanan yang dipenuhi patriarki.
- 5) Perempuan perlu kemandirian finansial untuk memenuhi keterwakilan di parlemen
- 6) Parlemen Indonesia sendiri sudah menetapkan beberapa UU yang berdampak pada keberpihakan pada perempuan dan memastikan perjuangan perempuan mendapat dukungan negara. Beberapa UU tersebut adalah: UU TPKS, perdagangan manusia, uu perlindungan anak, dan terbaru uu KIA.
- 7) Free and meal program yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo guna mendukung generasi masa depan.

b. **Sesi II Pushing back against the pushback**

Sesi II membahas tema Melawan Reaksi Balik. Sesi ini membahas hambatan dan bahaya dari reaksi balik yang menghambat kemajuan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dengan menekankan tindakan parlemen yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Peserta akan mengidentifikasi bentuk reaksi balik, kekuatan pendukungnya, serta kerusakan yang ditimbulkan terhadap upaya kesetaraan gender. Sesi ini juga mengeksplorasi solusi konkret untuk membalikkan reaksi balik dan mempertahankan momentum menuju kesetaraan gender, termasuk melalui kemitraan global untuk mendukung implementasi agenda BPfA dan SDGs.

Pertanyaan Utama yang Dibahas:

- 1) Di area mana reaksi balik paling sering terjadi, dan kerusakan apa yang ditimbulkannya?
- 2) Tindakan transformatif apa yang dapat diambil oleh parlemen untuk melindungi kemajuan dalam kesetaraan gender?
- 3) Bagaimana parlemen dapat menjadi institusi yang sensitif terhadap gender dan mampu melawan reaksi balik?
- 4) Kemitraan apa yang diperlukan untuk mengatasi kemunduran dalam hak-hak perempuan?

Poin-poin ini mencerminkan fokus sesi dalam mengidentifikasi tantangan dan merancang strategi untuk melawan reaksi balik terhadap kesetaraan gender.

Dalam sesi II ini, delegasi BKSAP DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri menyampaikan intervensi. Berikut adalah poin penting intervensi yang disampaikan anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi PDIP:

- 1) Tema even parlemen CSW ke-69 mengingatkan pada feminis Indonesia Raden Ajeng Kartini. Di tahun 1905, Kartini mengatakan "jangan lagi ada zaman kegelapan di mana perempuan diperlakukan semena-mena"
- 2) 100 tahun setelah Kartini, 30 tahun BPFA, dan satu dekade SDGs, ketidakadilan gender tetap ada.
- 3) Aksi afirmatif harus kita kedepankan untuk mengatasi tantangan sistemik yang meminggirkan peran perempuan akibat struktur patriarki.
- 4) Saya meminta semua anggota parlemen dunia untuk memaksimalkan fungsi parlemen di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mencapai SDGs khususnya SDG5 tentang kesetaraan gender.
- 5) DPR RI mengambil 3 langkah transformatif guna mencapai kesetaraan gender dan perlindungan thdp hak-hak perempuan. Pertama, pembuatan dan penguatan uu yang melindungi dan mengedepankan kesetaraan gender serta memastikan kuota keterwakilan 30% perempuan calon anggota legislatif di tingkat partai. Kedua, mengalokasikan anggaran untuk mengedepankan kebijakan sensitif gender guna memastikan kebijakan negara inklusif dan memperhatikan kebutuhan unik perempuan. Ketiga, membentuk Kaukus Perempuan Parlemen untuk mendukung kepemimpinan perempuan dan memfasilitasi partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan kebijakan.
- 6) Dalam mengatasi kemunduran dan bahaya, DPR RI berkomitmen melawan reaksi balik dan berupaya mencapai kesetaraan gender serta melindungi hak-hak perempuan seperti tersurat dalam SDG5. Forum ini mesti kita gunakan untuk membangkitkan aksi nyata mewujudkan masyarakat adil dan inklusif.
- 7) Kesetaraan gender membutuhkan laki-laki, dan laki-laki membutuhkan kesetaraan gender.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2025 di Markas Besar PBB, New York-Amerika Serikat berjalan dengan lancar dan sukses.
2. Acara CSW69 menandai peringatan 30 tahun Deklarasi Beijing dan Platform Aksi (BPFA), dengan menegaskan pentingnya meneruskan dan mengembangkan warisan kesetaraan gender yang telah dicapai selama tiga dekade terakhir.
3. Acara sesi parlemen ini menyoroti peran sentral parlemen dalam memajukan kesetaraan gender. Parlemen didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengembangkan kebijakan dan strategi legislasi yang mendukung hak-hak perempuan, sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender.
4. Salah satu tema utama adalah bagaimana menghadapi dan melawan reaksi balik atau antisipasi terhadap upaya kesetaraan gender. Diskusi menekankan perlunya respon strategis agar kemajuan yang telah dicapai tidak terganggu oleh dinamika politik atau sosial yang regresif.
5. Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri sesi pembukaan, Sesi I, dan Sesi II sesuai agenda dan program yang telah ditetapkan dan telah berpartisipasi aktif dengan memberikan intervensi dalam Sesi I maupun Sesi II.

B. Saran

1. Hasil-hasil Sidang Event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) perlu disampaikan kepada Komisi I, VIII, dan XI dan diharapkan hasil-hasil Sidang dapat menjadi bahan masukan ketika melakukan Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja atau saat pembahasan RUU terkait dengan penguatan peran perempuan .
2. Hasil-hasil Event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) ini perlu didiseminasikan lebih lanjut dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, maupun Bappenas.
3. Pengiriman delegasi ke Komisi Status Perempuan (CSW) ke depan dapat melakukan FGD dengan mengundang instansi terkait sesuai tema sidang. Hal ini bertujuan untuk memperkaya substansi materi.
4. Pengiriman delegasi ke forum-forum internasional yang membahas kesetaraan gender lainnya perlu diintensifkan guna menjalin kerja sama

global dan bertukar pengalaman, strategi, dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Kerja sama global ini diharapkan dapat memperkuat jaringan dan mempercepat pencapaian target kesetaraan gender secara transnasional.



IV. PENUTUP

A. Ucapan Terima Kasih

Atas nama Delegasi BKSAP DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti pelaksanaan event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2025 di Markas Besar PBB, New York–Amerika Serikat.

Semoga peran BKSAP DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dan kegiatan-kegiatan IPU dan PBB di masa yang akan datang.

B. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Bahan Masukan
2. Poin Intervensi
3. Bahan Masukan dari Kementerian Terkait
4. Dokumentasi Foto Delegasi Selama Persidangan

C. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi BKSAP DPR RI pada event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) pada tanggal 11 Maret 2025 di Markas Besar PBB, New York Amerika Serikat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2025

a.n. Delegasi BKSAP DPR-RI,

ttd

Irine Yusiana Roba Putri

A-258





@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id